

# Pola Sebaran Wilayah Ketahanan Pangan di Provinsi Banten

Deby Eryani Setiawan<sup>1</sup>, M.H. Dewi Susilowati<sup>2</sup>, Hafid Setiadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Geografi, Universitas Indonesia, Depok16424  
E-mail : deby.eryani@ui.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Geografi, Universitas Indonesia, Depok16424  
E-mail : maria.hedwig@ui.ac.id

<sup>3</sup>Jurusan Geografi, Universitas Indonesia, Depok16424  
E-mail : hafid.setiadi@ui.ac.id

## ABSTRAK

Salah satu program prioritas pemerintah adalah kedaulatan pangan. Provinsi Banten termasuk ke dalam kategori prioritas 3 penanganan kerawanan pangan atau memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang. Di Pulau Jawa khususnya, prioritas 3 merupakan kategori terendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola sebaran wilayah ketahanan pangan di Provinsi Banten berdasarkan 3 aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh fisik (topografi) dan non-fisik (kerapatan jalan dan lumbung pangan) terhadap wilayah ketahanan pangan. Metode yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi wilayah ketahanan pangan yaitu teknik *overlay* dan digunakan analisis spasial untuk menjelaskan pola sebaran ketahanan pangan. Kemudian uji statistik digunakan untuk mengetahui keterkaitan faktor fisik dan non-fisik terhadap ketahanan pangan. Hasil yang diperoleh yaitu Provinsi Banten didominasi oleh wilayah dengan klasifikasi sangat tahan pangan. Wilayah dengan ketahanan pangan yang tinggi (sangat tahan pangan) paling banyak ditemukan pada wilayah yang jaraknya dekat dengan ibukota Provinsi Banten. Namun wilayah dengan klasifikasi yang lebih rendah dibandingkan sangat tahan pangan juga ditemukan di dekat ibukota provinsi. Oleh karena itu, hukum Tobler 1 tidak berlaku pada kasus ini. Ketahanan pangan di Provinsi Banten tidak dipengaruhi oleh jauh atau dekatnya suatu daerah dengan ibukota provinsi, melainkan dipengaruhi oleh keberadaan lumbung pangan.

### Kata Kunci

*Ketahanan Pangan, Pola Sebaran, Lumbung Pangan, Topografi*

## 1. PENDAHULUAN

Kondisi terpenuhinya kebutuhan akan pangan dikenal dengan istilah ketahanan pangan. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 mengenai pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.[1]

Berdasarkan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* 2015, 3 dari 4 kabupaten di Provinsi Banten termasuk ke dalam kategori prioritas 3 penanganan kerawanan pangan [2]. Dengan kata lain, Provinsi Banten memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang. Di Pulau Jawa khususnya, prioritas 3 merupakan kategori terendah atau dengan kata lain kerawanan pangan terparah di Pulau Jawa berada pada kabupaten dengan prioritas 3. Selain itu, Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten yang tinggi merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran wilayah ketahanan pangan di Provinsi Banten sekaligus memperoleh

gambaran tentang kondisi tingkat ketahanan pangan di Provinsi Banten. Secara spasial, pola sebaran wilayah ketahanan pangan dijelaskan dengan mengkaitkan wilayah kecamatan yang telah terklasifikasi ketahanan pangannya dengan kedekatan (jarak) terhadap pusat kota Provinsi Banten yang terletak di Kota Serang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh faktor fisik (topografi) dan non-fisik (kerapatan jaringan jalan dan keberadaan lumbung pangan) terhadap wilayah ketahanan pangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Meskipun pemahaman teoritis mengenai ketahanan pangan sudah semakin membaik, namun tidak ada ukuran tunggal yang secara sempurna yang dapat menggambarkan ketahanan pangan. Mengingat sifatnya yang multidimensional, umumnya disepakati beberapa indikator untuk menghitung ketahanan pangan. Beberapa penelitian telah mengombinasikan berbagai indikator ketahanan pangan ke dalam satu indeks komposit tunggal dan indikator yang digunakan dari setiap penelitian dapat berbeda-beda. Dengan begitu, perhitungan dimungkinkan dapat berbeda-beda pada berbagai negara, provinsi, hingga tingkat rumah tangga [3].

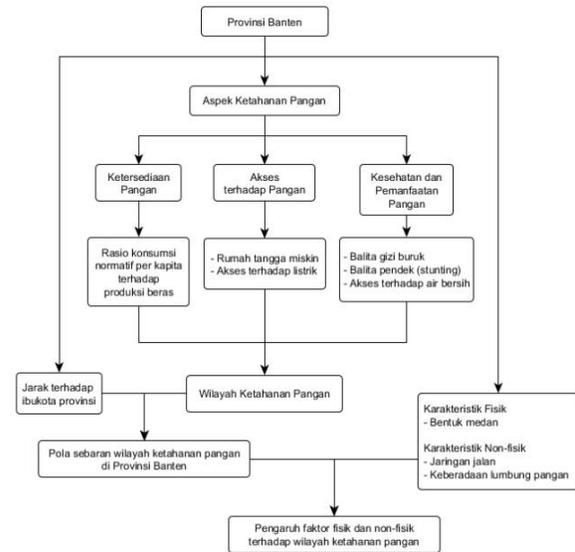
Langkah pertama menuju pengentasan masalah kerawanan pangan dimulai dengan mendokumentasikan dimensi spasial dan temporal kerawanan pangan [4]. Dewan ketahanan pangan bekerjasama dengan program pangan dunia PBB (*The United Nations World Food Programme*) telah menetapkan indikator-indikator ketahanan pangan berdasarkan 3 dimensi ketahanan pangan [5] yaitu ketersediaan pangan (rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi beras), akses terhadap pangan (rumah tangga miskin dan akses listrik) dan pemanfaatan pangan (balita gizi buruk, balita stunting dan akses air bersih).

Situasi wilayah tahan pangan dapat dipetakan berdasarkan batas-batas administrasi yang kemudian dapat menjadi bahan untuk perencanaan wilayah dalam menentukan kebijakan untuk memilih ruang intervensi dan telaah masalah yang akan diambil [6].

Ketahanan pangan erat kaitannya dengan pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik dalam hal ekonomi, kesehatan, maupun sosial akan berpengaruh pada semakin baiknya indikator-indikator ketahanan pangan, yang kemudian dapat meningkatkan ketahanan pangan tersebut. Pelayanan publik yang baik dan memadai biasanya terpusat di daerah yang berdekatan dengan kota. Hal inilah yang menyebabkan kondisi dari suatu lokasi pengamatan yang dekat dengan kota akan berbeda dengan lokasi pengamatan yang jauh dari kota. Kondisi di suatu lokasi pengamatan akan memiliki hubungan yang erat dengan lokasi pengamatan lain yang berdekatan. Hukum pertama geografi yang dikemukakan oleh Tobler (*Tobler's first law of geography*) menyatakan bahwa "everything is related to everything else, but near things are more related than distant things" [7]. Hukum pertama geografi tersebut memiliki arti bahwa segala sesuatu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi sesuatu yang dekat lebih mempunyai pengaruh daripada sesuatu yang jauh. Oleh karena itu, daerah yang dekat dengan kota/ibukota diasumsikan memiliki pelayanan publik yang cenderung lebih baik sehingga ketahanan pangannya juga lebih baik dibandingkan dengan daerah yang jauh dari kota/ibukota.

### 3.METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alur pikir penelitian digambarkan pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

Untuk meneliti wilayah ketahanan pangan di Provinsi Banten, indikator yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Ketahanan Pangan

Indikator	Jenis Data	Sumber Data
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi beras	Produksi beras	Dinas Pertanian, 2016
	Jumlah penduduk per kecamatan	BPS, 2016
Rumah tangga miskin	Jumlah rumah tangga miskin per kecamatan	BAPPEDA, 2015
	Jumlah rumah tangga tanpa akses listrik per kecamatan	BAPPEDA, 2015
Balita gizi buruk	Jumlah balita dengan gizi buruk per kecamatan	Dinas Kesehatan, 2015
	Jumlah balita stunting per kecamatan	Dinas Kesehatan, 2014
Akses terhadap air bersih	Jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih per kecamatan	BAPPEDA, 2015

Pengolahan data meliputi pengolahan data spasial dan pengolahan data tabular. Pengolahan data spasial meliputi pembuatan peta topografi dengan mengolah data DEM SRTM, pengolahan peta kerapatan jaringan jalan, serta pembuatan peta titik lumbung pangan. Pengolahan data tabular dimulai dengan inventarisasi data masing-masing indikator dari 121 kecamatan di Provinsi Banten. Kedua,

dilakukan perhitungan persentase dari masing-masing indikator. Ketiga, data yang telah dipersentasekan kemudian dikonversi menjadi skor tertentu (skoring). Keempat, data yang telah diskoring kemudian dikalikan dengan bobot dari masing-masing indikator. Bobot indikator terdapat pada tabel 2. Kelima, dilakukan perhitungan komposit wilayah ketahanan pangan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh indikator pada tiap kecamatan. Kemudian dilakukan klasifikasi wilayah ketahanan pangan dengan klasifikasi di tabel 3.

Tabel 2. Bobot Indikator

Indikator	Bobot
NCPR	0.54
Keluarga prasejahtera	0.74
Akses listrik	0.46
Gizi buruk	0.4
Stunting	0.4
Akses air	0.23

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi Banten, 2014

Tabel 3. Klasifikasi Ketahanan Pangan

Nilai Komposit	Klasifikasi Ketahanan Pangan
< 27.74	Tidak tahan pangan
27.74 – 55.49	Kurang tahan pangan
55.49 – 83.23	Agak tahan pangan
83.23 – 110.97	Cukup tahan pangan
110.97 – 138.72	Tahan pangan
> 138.72	Sangat tahan pangan

Sumber: Pengolahan data, 2017

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis spasial dan analisis statistik. Analisis spasial digunakan untuk memperoleh peta wilayah ketahanan pangan yang dilakukan dengan cara tumpang susun (*overlay*) terhadap indikator-indikator ketahanan pangan. Analisis spasial juga dilakukan untuk mengetahui pola sebaran ketahanan pangan dengan melihat keterkaitan wilayah ketahanan pangan dengan jarak dari pusat Ibukota Provinsi. Sementara itu analisis statistik (*Chi Square*) digunakan untuk menjelaskan faktor fisik dan nonfisik apa saja yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Korelasi *Chi Square* digunakan untuk menentukan hubungan antara ketahanan pangan (kelas komposit ketahanan pangan) dengan kelas kerapatan jaringan jalan, ketersediaan lumbung pangan dan topografi. Hasil dari perhitungan ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara ketahanan pangan dengan faktor-faktor fisik dan non-fisik tersebut.

Tabel 4. Variabel Penelitian

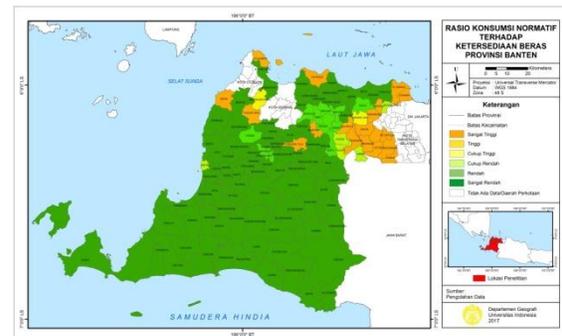
Variabel	Jenis Data	Sumber
Wilayah ketahanan pangan	Nilai komposit ketahanan pangan	Pengolahan data
Topografi	Klasifikasi topografi	Pengolahan data DEM SRTM 90m
Aksesibilitas penghubung	Kerapatan jaringan jalan per kecamatan	Pengolahan data
Lumbung pangan	Keberadaan lumbung pangan per kecamatan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP)

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Indikator Ketahanan Pangan

#### 4.1.1 Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita (*Normative Consumption Per Capita Ratio – NCPR*)

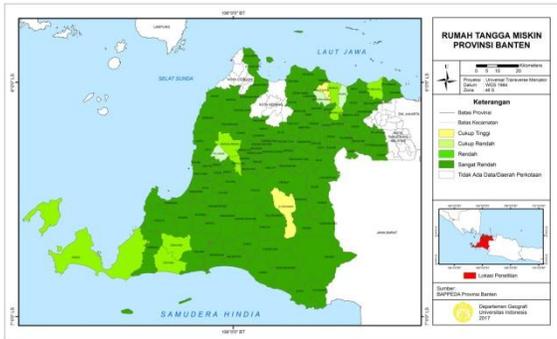
NCPR merupakan indikator yang dapat merepresentasikan suatu daerah surplus atau defisit produksi beras. Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah Provinsi Banten telah mencapai surplus pangan, yang ditunjukkan oleh banyaknya wilayah dengan klasifikasi sangat rendah. Semakin rendah klasifikasi NCPR, maka akan berpengaruh pada tingginya ketahanan pangan di daerah tersebut.



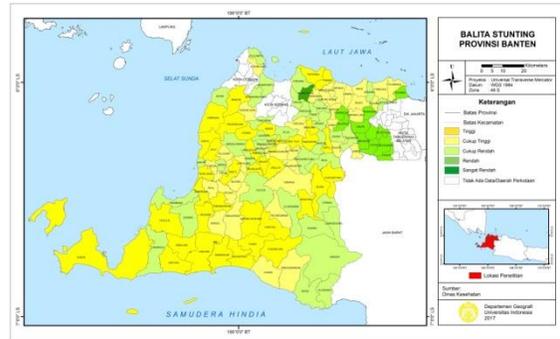
Gambar 2. Peta Rasio Konsumsi Normatif terhadap Produksi Beras Provinsi Banten tahun 2016

#### 4.1.2 Rumah Tangga Miskin

Rumah tangga miskin merupakan indikator yang penting dalam perhitungan wilayah ketahanan pangan. Akses rumah tangga terhadap pangan bergantung pada pendapatan rumah tangga, yang tercermin dari status kesejahteraan rumah tangga tersebut. Terlihat pada gambar 3 bahwa sebagian besar kecamatan di Provinsi Banten memiliki persentase rumah tangga miskin yang sangat rendah. Semakin sedikit rumah tangga miskin, maka semakin meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.



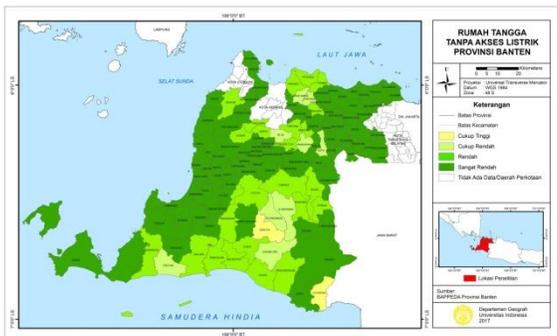
Gambar 3. Peta Persentase Rumah Tangga Miskin Provinsi Banten tahun 2015



Gambar 5. Peta Persentase Balita Pendek (*Stunting*) Provinsi Banten tahun 2014

#### 4.1.3 Rumah Tangga tanpa Akses Listrik

Akses terhadap listrik merupakan indikator yang dapat menjadi cerminan tingkat kemampuan ekonomi suatu rumah tangga. Selain itu, tidak adanya akses terhadap listrik mencerminkan keterisolasian suatu daerah dan mengindikasikan kurangnya pelayanan publik di daerah tersebut. Berdasarkan gambar 4, ternyata belum semua rumah tangga di Provinsi Banten telah menggunakan listrik. Semakin rendah/sedikit rumah tangga tanpa akses listrik, maka semakin meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.



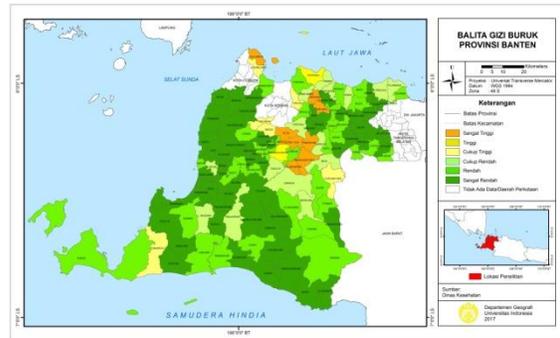
Gambar 4. Peta Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik Provinsi Banten tahun 2015

#### 4.1.4 Balita Pendek (*Stunting*)

Indikator balita pendek (*stunting*) menunjukkan kemampuan individu untuk menyerap zat gizi / pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh. Angka balita stunting (tinggi badan berdasarkan umur), dapat mencerminkan status gizi balita. Provinsi Banten memiliki jumlah balita stunting yang tergolong tinggi yakni lebih dari 40% per kecamatan yang tersebar hampir di seluruh daerah Provinsi Banten, yang dapat dilihat pada gambar 5. Semakin banyak persentase balita pendek, maka semakin mengurangi nilai besaran ketahanan pangan di daerah tersebut.

#### 4.1.5 Balita Gizi Buruk

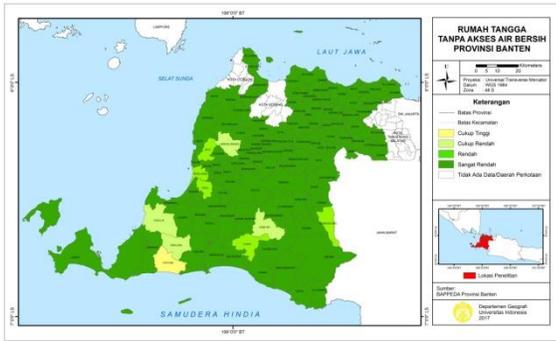
Angka balita gizi buruk (berat badan berdasarkan umur), dapat mencerminkan status gizi anak usia di bawah lima tahun. Berdasarkan gambar 6, Provinsi Banten memiliki jumlah balita gizi buruk yang tergolong rendah yakni kurang dari 40% per kecamatan yang tersebar hampir di seluruh Provinsi Banten. Semakin rendah/sedikit persentase balita gizi buruk, maka semakin meningkatkan klasifikasi ketahanan pangan di daerah tersebut.



Gambar 6. Peta Persentase Balita Gizi Buruk Provinsi Banten tahun 2015

#### 4.1.6 Akses terhadap Air Bersih

Akses terhadap air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh. Di Provinsi Banten terlihat bahwa hampir seluruh kecamatan telah memiliki akses ke air bersih yang terlihat pada gambar 7. Semakin rendah/sedikit rumah tangga tanpa akses air bersih, maka semakin meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.

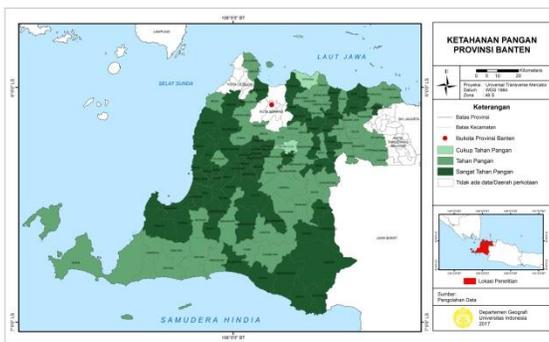


Gambar 7. Peta Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Provinsi Banten tahun 2015

#### 4.2 Pola Sebaran Wilayah Ketahanan Pangan

Gambaran wilayah ketahanan pangan pada 121 kecamatan di provinsi Banten dipetakan pada gambar 8. Peta tersebut diperoleh dengan melakukan skoring pada masing-masing indikator ketahanan pangan, kemudian skor tersebut dikalikan dengan bobot masing-masing indikator. Nilai dari masing-masing indikator kemudian dijumlah sehingga menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan tiap kecamatan.

Hasil dari *overlay* indikator-indikator ketahanan pangan di Provinsi Banten menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan memiliki status sangat tahan pangan. Sebanyak 62 kecamatan (51,2%) memiliki status sangat tahan pangan dan 57 kecamatan (47,1%) berstatus tahan pangan. Hanya ada 2 kecamatan (1,7%) yang berstatus cukup tahan pangan.



Gambar 8. Peta Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Karakteristik wilayah rawan pangan dan gizi yaitu letak lokasi berada jauh dari pusat kota atau pusat pelayanan [8]. Dapat pula dikatakan bahwa semakin dekat dengan pusat pelayanan (pusat kota) maka daerah tersebut semakin tinggi ketahanan pangannya. Pada penelitian ini, sebaran wilayah ketahanan pangan secara spasial dijelaskan dengan mengkaitkan klasifikasi wilayah ketahanan pangan dengan jarak terhadap ibukota provinsi. Jarak yang dimaksud adalah panjang jalan yang ditempuh dari ibukota provinsi Banten yaitu Kota Serang ke masing-masing kecamatan.

Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap peta ketahanan pangan pada gambar 8, terlihat cukup jelas bahwa yang berada di sekitar ibukota justru wilayah dengan

klasifikasi tahan pangan atau bukan peringkat terbaik dari ketahanan pangan. Wilayah dengan peringkat terbaik dari ketahanan pangan yaitu klasifikasi sangat tahan pangan tidak berada dominan di dekat ibukota provinsi maupun kota lainnya. Klasifikasi sangat tahan pangan justru terlihat banyak berada di sebelah tenggara (Kabupaten Lebak) yang jaraknya jauh dari ibukota dan terlihat banyak berada di sebelah barat (Kabupaten Pandeglang) yang berjarak sedang dari ibukota. Dengan begitu, maka asumsi awal yaitu daerah yang dekat dengan kota/ibukota cenderung lebih baik ketahanan pangannya dibandingkan dengan daerah yang jauh dari kota/ibukota, tidak terbukti pada penelitian ini. Wilayah yang dekat dengan ibukota justru tidak berpengaruh terhadap tingginya tingkat ketahanan pangan. Maka, Hukum Tobler yang berbunyi “sesuatu yang dekat lebih mempunyai pengaruh daripada sesuatu yang jauh” tidak berlaku pada penelitian ini.

#### 4.3 Hubungan Ketahanan Pangan dengan Topografi

Kecamatan di Provinsi Banten tersebar hampir merata di setiap klasifikasi topografi. 22,3 % berada pada topografi datar, 19,8 % berada pada topografi datar-berombak, 24,7% berada pada topografi bergelombang dan 25,6% yang berada pada topografi berbukit. Hanya 7% kecamatan yang berada pada topografi bergunung.

Uji *Chi Square* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan antara klasifikasi ketahanan pangan dengan klasifikasi topografi. Berdasarkan perhitungan didapatkan *Chi Square* hitung adalah 9,092. Dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% dan derajat kebebasan (df) = 8, diperoleh *Chi Square* tabel yaitu 15,507. Karena *Chi Square* hitung < *Chi Square* tabel (9,092 < 15,507), maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian, tidak ada hubungan antara kelas ketahanan pangan dengan topografi di tiap kecamatan.

#### 4.4 Hubungan Ketahanan Pangan dengan Jaringan Jalan

Terlihat bahwa Provinsi Banten didominasi oleh kecamatan dengan kerapatan jaringan jalan yang rendah. Sebanyak 34 kecamatan (28 %) dengan klasifikasi sangat tahan pangan justru memiliki kerapatan jaringan jalan yang rendah. Hanya sekitar 6 kecamatan (4,95 %) sangat tahan pangan yang memiliki kerapatan jaringan jalan yang tinggi.

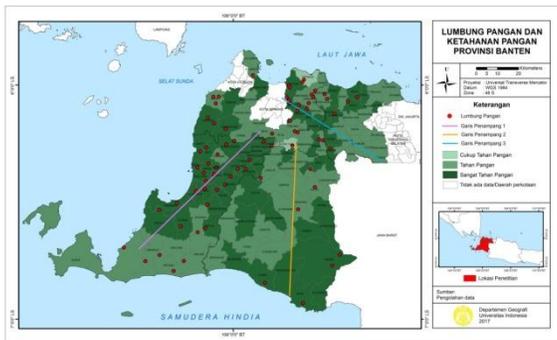
Uji *Chi Square* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan antara klasifikasi ketahanan pangan dengan klasifikasi jaringan jalan. Berdasarkan perhitungan didapatkan *Chi Square* hitung adalah 2,397. Dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% dan derajat kebebasan (df) = 4, diperoleh *Chi Square* tabel yaitu 9,288. Karena *Chi Square* hitung < *Chi Square* tabel (2,397 < 9,288), maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian, tidak ada hubungan antara kelas ketahanan pangan dengan jaringan jalan di tiap kecamatan.

#### 4.5 Hubungan Ketahanan Pangan dengan Lambung Pangan

Di Provinsi Banten, tidak semua kecamatan memiliki lambung pangan. Jumlah antara kecamatan yang memiliki lambung pangan dengan yang tidak memiliki hampir sama. Sekitar 61 kecamatan (50.4 %) tidak memiliki lambung pangan, sedangkan 60 kecamatan (49.6%) memiliki lambung pangan. Lambung pangan di tiap kecamatan jumlahnya berkisar 1-3 titik lambung pangan. Kecamatan yang memiliki lambung pangan dan memiliki klasifikasi sangat tahan pangan memiliki jumlah terbanyak yaitu 38 kecamatan (31.4%).

Uji *Chi Square* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan antara klasifikasi ketahanan pangan dengan keberadaan lambung pangan. Berdasarkan perhitungan didapatkan *ChiSquare* hitung adalah 10.224. Dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% dan derajat kebebasan (df) = 4, diperoleh *Chi Square* tabel yaitu 5.991. Karena *Chi-Square* hitung < *ChiSquare* tabel (5.991 < 10.224), maka  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, ada hubungan antara kelas ketahanan pangan dengan jaringan jalan di tiap kecamatan.

Setelah diketahui bahwa terdapat hubungan antara ketahanan pangan dan lambung pangan, kemudian dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana sebaran wilayah ketahanan pangan terhadap keberadaan lambung pangan. Untuk itu, dibuatlah peta titik lambung pangan terhadap wilayah ketahanan pangan (Gambar 9), serta dibuat penampang melintang untuk menganalisis secara lebih detail mengenai kecenderungan lokasi lambung pangan terhadap wilayah ketahanan pangan.



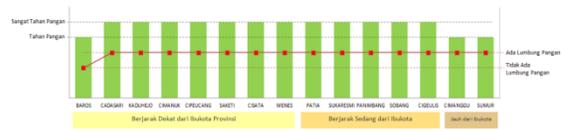
Gambar 9. Peta Lokasi Lambung Pangan terhadap Wilayah Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2015

Peta tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang sangat tahan pangan dan memiliki lambung pangan saling mengelompok di lokasi yang sama. Begitu pula wilayah yang tahan pangan dan tidak memiliki lambung pangan saling mengelompok di lokasi yang sama. Untuk lebih menguatkan hal tersebut, dibuat grafik penjabaran dari penampang melintang dan keberadaan lambung pangan (Gambar 10).

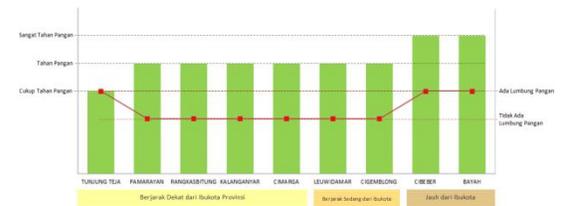
Grafik menunjukkan bahwa klasifikasi ketahanan pangan dengan keberadaan lambung pangan memiliki kecenderungan pola tertentu. Pola umum di penampang 1 yaitu semakin tinggi ketahanan pangan (sangat tahan pangan), maka di wilayah

tersebut dijumpai lambung pangan. Pola umum di penampang 2 yaitu semakin rendah ketahanan pangan (tahan pangan), maka di wilayah tersebut tidak dijumpai lambung pangan. Pola umum di penampang 3 yaitu jika ketahanan pangan relatif tinggi (sangat tahan pangan) maka di wilayah tersebut terdapat lambung pangan dan jika ketahanan relatif rendah (tahan pangan) maka di wilayah tersebut tidak terdapat lambung pangan.

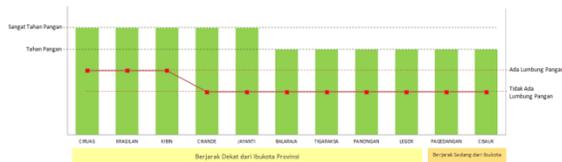
Grafik Penampang 1



Grafik Penampang 2



Grafik Penampang 3



Gambar 10. Grafik Penampang Ketahanan Pangan dan Lambung Pangan

#### 5. KESIMPULAN

Provinsi Banten didominasi oleh wilayah dengan klasifikasi sangat tahan pangan. Wilayah dengan ketahanan pangan yang tinggi (sangat tahan pangan) paling banyak ditemukan pada wilayah yang jaraknya dekat dengan ibukota Provinsi Banten. Selain itu, wilayah dengan ketahanan pangan yang tinggi (sangat tahan pangan) tidak hanya ditemukan di dekat ibukota provinsi, tetapi juga ditemukan pada wilayah yang jaraknya jauh dari ibukota provinsi.

Faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Provinsi Banten adalah keberadaan lambung pangan. Pada wilayah ketahanan pangan yang relatif tinggi (sangat tahan pangan), umumnya terdapat lambung pangan. Sedangkan pada wilayah ketahanan pangan yang relatif lebih rendah (tahan pangan), umumnya tidak terdapat lambung pangan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BAPPEDA Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinas Pertanian Provinsi Banten, yang telah membantu dalam hal penyediaan data serta kepada dosen pembimbing penelitian yang telah banyak memberikan saran dan perbaikan kepada penulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Pangan Nomor 7 tahun 1996. Diunduh dari [www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/47/477.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/47/477.bpkp)
- [2] Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan RI dan World Food Programme United Nation. "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia." Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme United Nation, 2015.
- [3] Wineman, A. "Multidimensional Household Food Security Measurement in Rural Zambia".
- [4] Schuette, C. K. "A Place-based Assessment of Food Insecurity in the North Central Health District of Idaho". Idaho: College of Graduate Studies University of Idaho, Published by ProQuest LLC, 2014 Agricultural & Applied Economics Association's 2014 AAEA Annual Meeting. Minneapolis, 2014.
- [5] Rustiadi. "Perencanaan dan Pengembangan Wilayah". Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008.
- [6] Tobler W., "A computer movie simulating urban growth in the Detroit region". *Economic Geography*, 46(2): 234-240, 1970.
- [7] Lubis, R. "Analisis Wilayah Rawan Pangan dan Gizi dalam Perspektif Perencanaan Wilayah (Studi Kasus Kota Bogor)". Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010.